

The Interface between Islam and Globalization &
Islam, Science and Technology



Proceedings *of the* Annual International Conference

On Islamic Studies

AICIS 2016

THE 16TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE
ON ISLAMIC STUDIES

IAIN RADEN INTAN LAMPUNG, NOVEMBER 1-4TH, 2016

PROCEEDINGS AICIS 2016



The Contribution of Indonesian Islam
to The World Civilization

Organized by



Kementerian Agama RI



IAIN Raden Intan Lampung

Supported by



Pemprov Lampung



PROCEEDING OF

THE 16TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC STUDIES

Theme

The Contribution of Indonesian Islam To The World Civilization

Sub Theme 4 :

The Interface between Islam and Globalization

**IAIN Raden Intan Lampung
November 1-4, 2016**

Organized by



Kementerian Agama RI



IAIN Raden Intan Lampung

Supported by



Pemprov Lampung

Tim Editor:

Kamran As'at Irsyady, Lc, M.A

Amri Syarif Hidayat, M.Si

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Buku ini berisi proceeding *selected paper* yang dipresentasikan pada AICIS ke-16 pada tanggal 1-4 November 2016 di IAIN Raden Intan Lampung. Berdasarkan catatan panitia bahwa jumlah *submitted paper* pada AICIS tahun ini sebanyak 1345, kemudian dilakukan seleksi oleh Tim SC dan diputuskan sebanyak 350 makalah yang dapat dipresentasikan dalam forum ini. Dari tiga ratus lima puluh dibagi menjadi dua kategori, yaitu *pertama*, kategori A (*selected presenter*) terdapat 120 makalah yang wajib dipresentasikan dalam forum paralel AICIS 2016 yang ditanggung oleh panitia. *Kedua*, kategori B terdapat 230 yang diberi kesempatan untuk mempresentasikan papernya pada forum paralel namun atas tanggungan atau biaya pribadi atau lembaga.

Sebagaimana lazimnya dalam sebuah konferensi, biasanya panitia selalu menerbitkan buku proceeding yang berisi kumpulan makalah yang dipresentasikan dalam forum tersebut. Begitu juga pada AICIS ke-16 kali ini, seluruh makalah kategori A sebanyak 120 diterbitkan menjadi buku ini.

Buku ini terdiri dari 4 buku, yaitu Buku 1 yang berisi gabungan makalah sub tema 1 (*The dynamics of Islamic Thought*) dan 5 (*Islam, Science and Tchnology*); Buku 2 berisi kumpulan makalah sub tema 2 (*The Dynamics of Islamic Institution*); Buku 3 berisi gabungan makalah sub tema 3 (*The Heritage of Islamic Traditions*) dan 6 (*Area Studies*); dan Buku 4 berisi kumpulan makalah sub tema 4 (*The Interface between Islam and Globalization*). Selain itu, panitia juga akan menerbitkan pada jurnal ilmiah yang terindek *scopus* setelah melalui penyempurnaan dan perbaikan supaya spektrumnya lebih besar dan dapat dibaca oleh masyarakat dunia.

Untuk itu, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh presenter yang telah melengkapi tulisannya sesuai yang telah ditentukan oleh panitia dan juga kepada Tim SC yang telah dengan sabar dan teliti membaca satu per satu makalah yang masuk kemudian memilih dan memutuskan berdasarkan kategori A dan B. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Rektor IAIN Raden Intan Lampung yang terus *mensupport* dan *memback-up* panitia untuk bekerja semaksimal mungkin demi suksesnya AICIS ke-16 ini. Tak lupa kepada Bapak Dirjen Pendis, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA dan Bapak Direktur Diktis, Prof. Dr. H. Amsal Bachtiar, MA yang telah mempercayakan penyelenggaraan AICIS ke-16 di IAIN Raden Intan Lampung.

Saya atas nama seluruh panitia mengucapkan selamat datang di “*Green Campus*” IAIN Raden Intan Lampung dan selamat berkonferensi.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Oktober 2016
Ketua Panitia,

Prof. Wan Jamaluddin Z., Ph.D

Sambutan

Kepala Sub Direktorat Akademik dan Kemahasiswaan

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Pelaksanaan AICIS ke-16 tahun 2016 kali ini yang bertempat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung merupakan momentum dalam menjaga kesinambungan dan komitmen pengelolaan pendidikan Islam di tingkat perguruan tinggi. Sebagai salah satu wahana dalam pengembangan jaringan dan juga penguatan wacana untuk mendukung riset dan publikasi, maka pelaksanaan AICIS merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam rangka mewujudkan perguruan tinggi yang berdaya saing.

Pendidikan tinggi saat ini menghadapi tantangan yang berbeda sama sekali dengan di zaman sebelumnya. Untuk menghadapi itu semua, maka hanya dengan kolaborasi dan kerjasama antara semua lembaga yang ada sehingga mampu mewujudkan sebuah capaian akademik yang memungkinkan. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam menjadi salah satu pilar untuk mewujudkan amanah yang diemban Kementerian Agama RI. Salah satu usaha yang berkesinambungan adalah pelaksanaan AICIS dari tahun ketahun. Tema tahun ini, Panitia Pengarah (*Steering Committee*) telah merumuskan tentang sumbangsih Islam Indonesia terhadap peradaban dunia.

Pendidikan tinggi Islam walau belum berstatus sebagai universitas riset, tetapi prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pengelolaan perguruan tinggi mulai mengarah kepada pengembangan atmosfer riset. Untuk itu, forum AICIS dimaksudkan juga sebuah wahana untuk menjadi salah satu sarana dalam mengkomunikasikan hasil-hasil riset yang selama ini sudah dilaksanakan oleh setiap dosen di seluruh perguruan tinggi keagamaan Islam.

Terima kasih juga kepada segenap panitia yang sudah bekerja untuk kesuksesan kegiatan ini sehingga bisa menjadi sebuah kegiatan yang berkesinambungan dari waktu ke waktu. Untuk itu, semoga kesempatan ini menjadi salah satu kesempatan terbaik untuk senantiasa menjadi ikhtiar bagi pengembangan pendidikan tinggi Islam.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jakarta, Oktober 2016

Subdit Akademik dan Kemahasiswaan
Kepala,

Dr. Muhammad

Sambutan

Rektor IAIN Raden Intan Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kesempatan berharga kepada IAIN Raden Intan Lampung untuk menjadi penyelenggara AICIS ke-16 tahun 2016 ini. Kami dan seluruh civitas akademika IAIN Raden Intan Lampung menyambut baik dan gembira hal itu serta berkomitmen untuk menyukseskannya dengan seluruh kemampuan dan sumber daya yang ada. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, kami telah mempersiapkan dengan baik seluruh kebutuhan sarana dan prasarana demi suksesnya acara tersebut.

Pada AICIS tahun ini mungkin akan dirasakan kesan yang berbeda karena penyelenggaraan kegiatan AICIS tidak seluruhnya di hotel melainkan di area kampus IAIN Raden Intan Lampung mulai dari *plenary session* maupun *parallel session* kecuali upacara pembukaan. Oleh karena itu, seluruh peserta AICIS ke-16 mulai dari pagi sampai sore akan beraktivitas di area kampus kami untuk mengikuti setiap kegiatan yang ada sambil menikmati suasana hijau kampus ("*green kampus*") kami.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dirjen Pendis, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA dan Direktur Diktis, Prof. Dr. H. Amsal Bakhtiar, MA yang telah mempercayakan kepada kami sebagai tuan rumah AICIS ke-16 ini. Kepada Gubernur Lampung Bapak Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi, M.Si yang telah memberi dukungan penuh demi terselenggaranya AICIS ini.

Penghargaan juga saya sampaikan kepada seluruh panitia baik pusat maupun lokal yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu dimana telah saling bekerjasama dalam menyukseskan acara ini.

Namun saya juga ingin memohon maaf kepada seluruh peserta konferensi, jika selama dalam penyelenggaraan AICIS ada hal-hal yang kurang berkenan baik mulai dari fasilitas, sarana dan prasarana maupun layanan. Mudah-mudahan dengan fasilitas yang ada seluruh peserta dapat menikmati dan memanfaatkannya sekalipun sangat terbatas.

Terakhir, saya sangat menyambut baik terbitnya *proceeding* ini yang tidak hanya sebagai dokumen penting seluruh kumpulan makalah yang dipresentasikan juga bisa menjadi buku referensi bagi perkembangan dan dinamika kajian Islam di Indonesia. Selamat membaca..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Oktober 2016
IAIN Raden Intan
Rektor,

Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag

Sambutan

Direktur Pendidikan Tinggi Islam

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) tanpa disadari telah memasuki tahun yang ke-16. Artinya tanpa disadari pula para peminat kajian Islam telah banyak memberikan kontribusi pemikirannya melalui forum ini. Dalam kurun waktu tersebut telah banyak rumusan-rumusan yang dihasilkan selain juga presentasi paper hasil penelitian maupun pemikiran dari para peminat dan pengkaji kajian Islam. Maka tak salah jika kita harus berbangga hati bahwa AICIS telah menjadi arena akademis PTKI yang mempertemukan berbagai latar belakang disiplin ilmu, pemikiran dan keahlian, selain juga menjadi arena yang representatif dalam mensosialisasikan gagasan, penyebaran ide dan *positioning* PTKI dalam kancan global.

Mengingat forum semacam AICIS telah menjadi *icon* bagi Kementerian Agama RI terutama Pendidikan Tinggi Islam, maka dalam setiap penyelenggaraan AICIS selalu ada dinamika yang terjadi sesuai dengan keberadaan PTKIN yang menjadi tuan rumah penyelenggaraannya. Dan hal yang patut disyukuri adalah dalam setiap penyelenggaraan AICIS jumlah paper yang masuk selalui melampaui target. Ini menunjukkan gairah para peminat kajian keislaman yang ingin turut serta dalam meramaikan forum ini setiap tahunnya sangat tinggi. Tahun ini saja menurut catatan panitia terdapat 1345 *submitted paper*, namun setelah dilakukan seleksi diputuskan ada 350 makalah yang akan dipresentasikan dalam forum ini.

Sebagai salah satu sarana mempublikasikan makalah-makalah yang terpilih tersebut, maka panitia membuat *proceeding* ini selain sebagai bahan referensi juga menjadi bahan dokumentasi makalah-makalah yang dipresentasikan dalam AICIS.

Saya menyambut baik diterbitkannya buku *proceeding* ini oleh panitia AICIS ke-16 IAIN Raden Intan Lampung. Mudah-mudahan selain membantu para peserta AICIS dalam mediskusikan beragam topik baik plenari maupun paralel juga sebagai media diseminasi ide maupun gagasan para pengkaji kajian keIslaman kepada publik secara luas..

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Oktober 2016
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
Direktur,

Prof. Dr. H. Amsal Bakhtiar, M.A

Sambutan

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sebagai event yang bergengsi di lingkungan Direktorat Pendidikan Islam, AICIS (*Annual International Conference on Islamic Studies*) telah membuktikan bahwa para dosen, peneliti dan pengkaji Islam terutama di lingkungan PTKI mampu menelorkan gagasan, pikiran dan temuan yang brilian dengan topik dan tema yang relevan dengan perkembangan situasi sekarang ini dalam perspektif keislaman. Dalam setiap event AICIS selalu ada hal-hal terbaru yang terungkap dalam kajiannya sehingga selalu menarik untuk diikuti oleh peserta yang hadir dalam setiap sesionnya.

AICIS selain memang merupakan pertemuan tahunan dalam mendialogkan hasil-hasil *research* terbaru untuk bisa dibaca, dikritisi dan diuji oleh sesama pengkaji dan pemerhati kajian keislaman, juga telah menjadi media membangun *intellectual networking* baik lokal maupun internasional. Di sinilah urgensi kenapa AICIS tetap dipertahankan keberadaannya sampai sekarang karena AICIS telah mampu membuktikan sebagai wadah yang representatif bagi diseminasi hasil-hasil kajian Islam kepada publik.

Tren yang selalu menggembirakan dalam setiap AICIS adalah kuantitas *submitted paper* selalu meningkat dari tahun ke tahun. Ini membuktikan bahwa AICIS telah mempunyai tempat tersendiri di kalangan pengkaji kajian Islam di PTKI bahkan tak jarang ada peserta dari perguruan tinggi umum yang ikut ambil bagian dalam forum ini.

Saya selalu mengharapkan kepada panitia penyelenggara supaya paper yang akan dipresentasikan bisa dicetak, diterbitkan dan di-onlinekan supaya dapat dinikmati oleh komunitas akademik yang lebih luas tidak hanya oleh komunitas internal kita saja melainkan komunitas internasional.

Dan syukur alhamdulillah pada AICIS ke-16 ini, IAIN Raden Intan Lampung telah bersedia menerbitkan menjadi *proceeding* ini. Mudah-mudahan dapat memberi kemudahan para peserta AICIS ke-16 dalam menyimak setiap tulisan yang dipresentasikan dalam forum ini.

Tak lupa pada kesempatan ini, ijinilah saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Menteri Agama RI yang selalu antusias dan memberikan perhatian serius pada setiap penyelenggaraan AICIS. Juga kepada Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi, M.Si yang telah memberi dukungan atas terselenggaranya AICIS di IAIN Raden Intan Lampung. Dan tak lupa Rektor IAIN Raden Intan Lampung, Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag beserta seluruh jajarannya yang tak kenal lelah dalam menyiapkan perhelatan besar ini dengan baik. Kepada seluruh panitia pusat dan daerah tak lupa saya sampaikan terima kasih atas kerjasamanya baik demi suksesnya acara ini. Terakhir kepada seluruh narasumber baik dalam

maupun luar negeri, partisipan dan peminat kajian keislaman yang hadir untuk menyemarakkan AICIS ke-16 ini, saya ucapkan terima kasih atas keikutsertaannya dalam forum ini.

Selamat berkonferensi...!!

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, Oktober 2016
Direktorat Pendidikan Islam
Direktur Jenderal,

Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA

Daftar Isi

Kata Pengantar	--iii--
Sambutan Rektor	--iv--
Sambutan Direktur Diktis	--v--
Sambutan Dirjen Pendis	--vi--
Daftar Isi	--viii

Sub Theme 4: The Interface between Islam and Globalization

1.	Mulawarman Hannase	Indonesian Muslims Contribution To The World Peace: Models Of Support For Palestine Conflict Resolution	1-16
2.	Annas Rolli Muchlisin	Re-Examining Indonesian Islam As Model For Democratic Muslim-Majority Countries	17-29
3.	Supriyadi	الوسطية الإسلامية بإندونيسيا بين الواقع والتحديات	30-43
4.	Adrian	Peran Sosial Pemuka Agama Dalam Menghadapi Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Bisex Dan Transgender) (Studi Kasus Perbandingan Peran Pemuka Agama Islam dan Nasrani Dengan Pendekatan Feminisme Di Kota Cirebon)	44-62
5.	Yeni Setianingsih	Legitimasi Islam Terhadap Konsep Demokrasi Di Indonesia: Perspektif Ulil Abshar Abdalla	63-78
6.	Fitri Yanti	Komunikasi Keluarga Beda Agama Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Agama Pada Anak (Studi Pada Keluarga Beda Agama Di Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)	79-93
7.	Munirul Ikhwan	Defining The Common Good For Indonesia : Nation-State and the Question of Religious and Cultural Diversity	94-113

8.	Ahmad Salehudin	Revitalisasi Identitas Diri Komunitas Masjid Dalam Perubahan Budaya Global: Studi Pada Komunitas Masjid Saka Tunggal Banyumas, Masjid Raya Al Fatah Ambon, Dan Masjid Agung Jami” Singaraja Bali	114-129
9.	Muhammad Shohibul Itmam	Pergumulan Islam Rimba Dan Islam Perkotaan Di Hutan Lindung Taman Nasional Bukit Dua Belas (Tnbd) Propinsi Jambi	130-144
10.	Faisal	Membangun Persepsi Positif Antar Umat Beragama: Belajar Dari Padang Dan Tanjungbalai	145-159
11.	Syawaluddin	Narasi Islam Dalam Repertoar Perlawanan Petani Atas Tanah PTPN VII Di Desa Rengas Payaraman Ogan Ilir Sumatera Selatan	160-183
12.	Abdur Rozaki	Islam, Oligarki Politik Dan Perlawanan Sosial di Madura	184-202
13.	Achmad Fawaid	Trans-Religious Identity From The Edge? Promoting Interfaith Dialogue Among Transgender Community In Yogyakarta	203-221
14.	Nurul Inayah	Potret Kelam Mantan Mucikari (Kehidupan Mantan Mucikari Setelah Penutupan Lokalisasi)	222-245
15.	Muhammad Ansor and Yaser Amri	Beyond Pious Critical Agency: Women, Interfaith Marriage And Religious Conversion In Contemporary Aceh	246-271
16.	Triana Sofiani	Perkawinan Bawah Umur Pada Masyarakat Muslim Di Kecamatan Sarang-Rembang (Merenggut Hak Dasar dan Kerentanan Anak Perempuan)	272-286
17.	Muhibuddin	Nasionalisme Ulama dalam Menangkal Paham Radikal Di Kalangan Santri Dayah Tradisional Di Aceh	287-303

18.	Ngainun Naim	Islam Radikal dan Strategi Deradikalisasi: Rekonstruksi Pemikiran Abdurrahman Wahid	304-319
19.	Asfa Widiyanto	Civil Society, Constitution And The Eradication Of Radicalism	320-340
20.	Ali Halidin	Implementation Of State Defense Curriculum In Warding Radicalism To University Student The Consederation Of Western Sydney University Program Bankstown Campus Australia SCCO-Community Engangedment Program Diktis-Kemenag 2015	341-360
21.	Nur Faizin Muhit	حلول النزاع في المجتمع المتعدد الثقافات والأديان محاولة بناء الانسجام والسلام في بمنظور القرآن؛ مجتمع دونوموليا في محافظة مالانج نموذجاً	361-380
22.	Rizqo Ahmadi	نشر دعوة التصوف الإجتماعي لمكافحة الإرهاب والتطرف	381-392
23.	Buyung Syukron	The Understanding Of Equivalency Of Islam And State : Measuring Paradigms And Concepts Of Experts Thought About Contemporary Islamic Political Movements In Indonesia	391-409
24.	Anthin Lathifah	Jihad Qital Dan Jihad Difa": Makna Dan Prilaku Pelaku Jihad Berbasis Agama Di Kota Semarang	410-434
25.	Ahmad Syarif H	Agama, Kitab Suci, Dan Kerusakan Lingkungan: Pemahaman Keagamaan Dan Sikap Tuan Haji Di Bangka Belitung Terhadap Penambangan Timah	435-453
26.	Mujib Ridlwan	Resiliensi Berbasis Religi Bagi Mantan Psk Dan Mucikari Pascapenutupan Lokalisasi Gandul Tuban	454-472
27.	Azhar Jaafar et.all	Remaja Muslim Dan Globalisasi: Isu Dan Tantangan	473-484
28.	Fahmi Irfani	Political Jawara Of Local Elits And Potrait Of Oligarchy In Indonesia After The Collapsed The New Order Regime	485-499

29.	Fathimatuz Zahra	Wisdom Of Leadership Lessons Based On Anbiya Wa Sholihin (Rethincking About Democracy Patterns)	500-513
30.	Amrullah Hayatudin	التسامح الديني في الإسلام وتطبيقاته في إندونيسيا	514-521
31.	Kana Kurniawan	Politik Hukum Keagamaan (Studi Kasus Pra dan Pasca Keterpilihan Jokowi-JK)	522-540
32.	Deffi Syahfitri Ritonga	Tipos Perempuan Dalam Narasi Sastra (Kritik Sastra Feminis Atas Novel Mudhakkirāt Ṭabībah dan Layar Terkembang)	541-560

ISLAM, OLIGARKI POLITIK DAN PERLAWANAN SOSIAL DI MADURA

Dr. Abdur Rozaki, M.Si

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Email: rozaki75@gmail.com

Abstrak: *Riset ini melihat perubahan penting yang terjadi dalam kaitan dengan dinamika politik dan persilangannya dengan Islam di Indonesia. Di dalamnya mengkaji bagaimana praktek demokrasi elektoral memberikan kesempatan politik bagi lahirnya orang kuat lokal menguasai pemerintahan daerah. Dengan basis sosial keagamaan dominan, orang kuat lokal ini membangun oligarki politik yang dibentengi para jagoan (blater) dan tokoh-tokoh agama. Riset ini juga menjelaskan, bagaimana masyarakat mencoba melawan oligarki politik orang kuat lokal dengan mengembangkan perlawanan sosial yang bermula dari lingkungan dalam ikatan kerabat (geneology) dan juga warga yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil. Mereka mendorong proses demokratisasi melalui tuntutan akses dan partisipasi masyarakat sipil dalam kebijakan pemerintahan. Mereka juga berupaya mengembangkan berjalannya mekanisme popular control untuk memastikan kebijakan yang diambil pemerintah lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat banyak dibandingkan kepentingan oligarki dan patron-client semata.*

Kata Kunci : Oligarki Politik, Perlawanan Sosial

Konteks dan Arah Penelitian

Reformasi politik di Indonesia yang berlangsung selama lebih dari satu dasawarsa terakhir ini melahirkan lanskap politik lokal yang dinamis dan beragam. Salah satunya adalah kembalinya orang kuat lokal dalam melakukan penguasaan politik di tingkat pemerintahan daerah. Orang kuat lokal yang sebelumnya hanya dominan di ranah kultural masyarakat dan memiliki akses politik yang terbatas di ranah negara, dengan adanya struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*) melalui liberalisasi politik dalam ranah demokrasi elektoral, mereka mampu melakukan pengorganisasian politik sehingga terpilih menjadi kepala daerah dan juga anggota dewan.

Salah satu yang menarik dari keberhasilan orang kuat lokal adalah FAI yang berhasil melakukan penguasaan politik di salah satu kabupaten di Madura. Di tengah transisi politik pasca tumbanganya Orde Baru, FAI mampu

menyingkirkan para aktor politik produk Orde Baru di panggung politik lokal dengan cara mengembangkan kekuatan politik keagamaan (*religio political power*) melalui *symbolic power* sebagai keturunan Syaikhona Kholil dari garis laki-laki satu-satunya untuk mempengaruhi para aktor politik lokal, baik itu politisi di parlemen, tokoh keagamaan dan kaum blater yang mengendalikan politik di desa.

Dalam konteks masyarakat Madura, Syaikhona Kholil adalah tokoh panutan dan pusat rujukan spritual masyarakat. Ia memiliki tempat terhormat di hati masyarakat Madura, bahkan para keturunannya pun memperoleh penghormatan dan dukungan kultural yang sangat kuat. Dukungan kultural inilah yang dikembangkan oleh FAI ke dalam dukungan politik sehingga menguasai politik pemerintahan daerah. Sejak keberhasilannya menjabat bupati tahun 2003, masyarakat berharap ia akan melakukan banyak terobosan untuk mengatasi problem kesejahteraan masyarakat, memulihkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi, mengembangkan religiusitas keagamaan yang mengedepankan nilai-nilai kemaslahatan umat, keadilan, musyawarah-membuka partisipasi kewargaan. Ia mengesampingkan nilai religiusitas dan demokrasi, namun lebih mengembangkan oligarki politik dalam mengelola pemerintahan.

Di banyak tempat seperti di Philipina, Thailand praktek oligarki politik ini tidak banyak memunculkan perlawanan sosial dari kekuatan masyarakat, kecuali adanya gesekan politik antar sesama oligarch dalam perebutan sumber daya daerah. Sementara untuk konteks oligarki politik di salah satu Kabupaten di Madura, memunculkan perlawanan sosial dari kekuatan *civil society*, khususnya yang diorganisir oleh anak muda lulusan perguruan tinggi yang sebelumnya pernah memperoleh pendidikan pesantren di Madura.

Riset ini berupaya menjawab pertanyaan: (1) *Bagaimana orang kuat lokal di BKL membangun oligarki politik di tingkat pemerintahan?* (2) *Tipe oligarki politik seperti apakah yang dikembangkan oleh orang kuat lokal sehingga menimbulkan perlawanan sosial dari masyarakat sipil?*

Untuk memperjelas posisi pembeda kajian ini dengan kajian sebelumnya, riset ini juga melacak beberapa literatur yang menarik dan relevan dalam mengkaji orang kuat lokal dan oligarki politik. Seperti studi Vedi R Hadiz dan Richard Robison yang mengurai jejak oligarki sudah lama ditenun dalam struktur politik Indonesia. Jika sebelumnya oligarki itu bekerja dalam sistem pemerintahan otoriter maka di era demokratisasi bekerja dalam sistem pemilihan umum, partai politik, parlemen dan politik uang untuk mempengaruhi dukungan pemilih guna meraih kekuasaan (Robison & Hadiz, 2004). Tak heran menurut kedua ilmuwan ini, jika orang kuat lama di era Orde Baru banyak yang kembali berkuasa, baik di pusat dan daerah.

Sedangkan dalam kajian John T Sidel era demokratisasi juga memunculkan oligarch baru yang berasal dari para orang kuat lokal dengan basis sosial kelompok kekerasan, yakni para aktivis Pemuda Pancasila yang memanfaatkan momentum Pemilu 2004 untuk menguasai pemerintahan

sebagaimana yang terjadi di Medan Sumatera Utara. (Sidel, 2004: 85-89). Kajian lebih komprehensif dilakukan oleh Jeffry Winters (2011) yang membuat pemaknaan lebih mendalam tentang oligarki dan pemetaan praktek oligarki di berbagai tempat di belahan dunia, termasuk Indonesia. Menurut Winters, oligarki di Indonesia termasuk dalam tipe oligarki sultanistik yang berjalan melalui tiga fase (1) fase militer-Cina yang berlangsung dari 1965-1974 ketika Soeharto sudah berkuasa dan mengalahkan pesaing-pesaing utamanya di militer, (2) fase ekspansif oligarki dengan memperluasnya ke Melayu Pribumi dari 1974-1978, (3) fase keluarga yang ditandai oleh keterlibatan putra-putri Soeharto dalam aksi oligarkis, dimulai pada pertengahan sampai akhir tahun 1980-an. Kajian Winters ini meletakkan oligarki sebagai basis utamanya adalah kekayaan yang terkonsentrasi pada individu tertentu.

Studi ini mengurai adanya varian baru dalam oligarki politik lokal di Madura, yakni adanya aktor politik yang membangun representasi pada basis sosial budaya keagamaan dominan. Kalam konteks ini, agama tidak sekedar dilihat dimensi religiusitasnya saja, praktek ekonomi politik yang terselubung dalam mekanisme relasi simbolik kultural antara dimensi aktor, tokoh utama dengan individu lainnya di dalam komunitas keberagamaan. Kemunculan oligarki politik berbasis keagamaan dominan ini cukup khas, karena bukan bagian dari jejaring patronase politik Orde Baru, sehingga dari sisi kajian tentang oligarki politik dapat memperkaya perspektif sebelumnya, baik yang dikembangkan oleh Winters (2011), Sidel (2004) maupun Hadiz dan Robison (2002).

Secara teoritik, kajian ini juga mempergunakan pemikiran ilmuwan sebelumnya, dengan tetap memperhatikan kontekstualisasi dan penafsiran baru dalam menganalisis data sehingga ada dimensi kebaruannya pula. Sebagaimana pemikiran Pierre Bourdieu tentang habitus. Bahwasannya, orang kuat lokal dapat muncul dari proses habituasi dan kepandaian dalam membuat strategi atas modal (*capital*) yang dimiliki sehingga mampu memenangkan pertarungan dalam berbagai medan ranah atau arena, baik politik, ekonomi dan sosial budaya lainnya yang kemudian berupaya melestarikan dominasi kuasa atas modalnya tersebut (Bourdieu, 1977: 488-11). Basis sosial dari para orang kuat lokal menunjukkan proses pembentukan habitus dan modal yang dimilikinya dalam membangun dominasi kuasa di dalam masyarakat dan juga pemerintahan.

Joel Migdal memperjelas adanya orang kuat karena faktor penguasaan atas kepemilikan tanah yang dapat menjadi modal pembentuk status dan pengaruh dalam relasi fungsional lainnya di dalam masyarakat. Hal ini tercermin pada sosok para keluarga tuan tanah, kepala suku dan aristokrasi lokal yang muncul sebagai sosok orang kuat lokal yang begitu mudah didapat melalui proses kelahiran dari para pendahulu sebelumnya sehingga membuatnya memiliki berbagai sumber modal, yakni modal kepemimpinan, ekonomi dan sosial budaya lainnya. Mereka terus berupaya untuk melestarikan dan mengembangkan modal yang dimiliki terhadap berbagai perubahan yang berkembang. Dalam konteks demokrasi modern, mereka tidak saja sekedar

bertahan tapi berupaya mengembangkan pengaruh dan memanfaatkan situasi perubahan yang ada dengan pola hubungan patron-klien.

Memang tidak semua hubungan patron-klien ini menjadi dasar utama dalam proses relasi kekuasaan yang dibangun oleh para orang kuat lokal. Sebagaimana yang diurai oleh John T Sidel, bahwasannya pola hubungan fungsional juga yang didasarkan oleh adanya kesamaan kepentingan antara para orang kuat lokal yang berbasis pada tuan tanah, kelompok kekerasan dan birokrat serta militer yang lebih dekat aksesnya terhadap birokrasi pemerintahan saling berkelindan membangun aliansi kepentingan untuk meraih kekuasaan dan mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintahan. Sebagaimana yang terjadi di Philipina, para keluarga tuan tanah terus beradaptasi dan menyesuaikan peran dengan liberalisasi politik dalam praktek demokrasi elektoral.

Mereka tetap berupaya melakukan kontrol dan mengendalikan politik pemerintahan melalui proses politik dalam demokrasi elektoral yang memungkinkannya dapat memenangkan pemilu sehingga dapat memasukkan anggota keluarganya di parlemen dan institusi pemerintahan. Kontrol dan kendalinya dalam berbagai kebijakan institusi modern membuat keluarga para tuan tanah dan orang kuat lainnya di lingkungan birokrasi pemerintahan mampu mengendalikan pula mekanisme pasar dan proyek pembangunan. Para keluarga tuan tanah ini juga membentuk sejenis milisi atau kelompok kekerasan untuk mengamankan aset dan pengaruh politiknya melalui pola hubungan patron-klien. Tak jarang adanya persaingan politik antar orang kuat dalam kendali dan kontrol pemerintahan menciptakan kekerasan politik berupa pembunuhan dan teror politik lainnya.

Apa yang terjadi di Indonesia memang tidak seekstrim di Philipina, namun demikian bahwa basis sosial para orang kuat lokal atau para aristokrasi politik tidak sepenuhnya pudar oleh kehadiran politik modern. Masih cukup banyak para orang kuat lokal atau aristokrasi politik yang mampu beradaptasi dan beraliansi dengan kekuatan baru dalam politik modern pasca kemerdekaan. Bahkan pasca Orde Baru runtuh, para aristokrat di berbagai daerah mengalami kebangkitan dan memanfaatkan arena politik demokrasi elektoral untuk memobilisasi rakyat dengan sentimen identitas, menghidupkan hubungan patron-klien dan pengaruh modal lainnya untuk mengambil alih kendali dan kekuasaan politik pemerintahan, baik di legislatif dan eksekutif. Para aristokrat yang sebelumnya kebanyakan menjadi anak manis Orde Baru dan tidak tampil secara menonjol dalam panggung politik pemerintahan, baru sesudah memasuki era reformasi politik dan munculnya struktur kesempatan politik dalam demokrasi elektoral kemudian tampil kembali dan menonjolkan politik identitasnya untuk memperoleh dukungan masyarakat.

Selama masa kekuasaan Orde Baru, banyak kelompok sosial yang berada dalam lingkaran kekuasaannya, mulai dari para aristokrat lokal, kelompok kekerasan sampai pada produk pendidikan modern, seperti militer, ekonom, teknokrat dan birokrat serta politisi. Orde Baru juga turut membesarkan para orang kuat dari basis sosial sebagaimana disebutkan tadi. Orang kuat yang

tumbuh dalam masa kekuasaan Orde Baru tersebut kemudian berupaya mempertahankan pengaruh dan kontrol politik atas sumber daya di tingkat pusat dan daerah. Robison dan Hadiz (2010) menyebutkan kemunculan mereka sebagai oligarch yang melakukan reorganisasi kekuasaan dalam masa transisi politik dengan memanfaatkan perangkat demokrasi yang masih rapuh, seperti kelembagaan partai politik, sistem dan penyelenggara pemilu, media massa yang masih dikuasai konglomerasi Orde Baru dan lemahnya konsolidasi masyarakat sipil sehingga dengan pengaruh uang dan jaringan sosial yang dimiliki para oligarch atau orang kuat produk Orde Baru mampu memenangkan pertarungan politik pada sejumlah arena dalam demokrasi elektoral. Golkar sebagai mesin kekuasaan Orde Baru masih mengendalikan dinamika politik parlemen, khususnya di tingkat pusat dan beberapa daerah utama di luar Jawa yang kaya akan sumber daya alam.

Upaya agar tetap membangun eksistensi politik guna mempertahankan dan memperluas kekayaan yang dimiliki membuat para oligarch produk Orde Baru menggunakan berbagai strategi, yakni dalam dinamika politik partai, selain tetap mempertahankan instrumen politik lama, mereka juga menyebar dan masuk kepada sejumlah partai produk reformasi dan ada juga dengan membuat partai baru. Partai baru ini muncul selain karena faktor perbedaan orientasi dan kepentingan politik dengan sesama oligarch lainnya sebagai sesama produk Orde Baru, juga didasarkan pada kepentingan untuk menjaga dan melestarikan kekayaan yang selama ini berhasil dicapainya selama berada dalam lingkaran rezim Orde Baru.

Para oligarch ini juga menggunakan sentimen politik identitas komunalitas etnik dan keagamaan untuk mempolitisasi emosi kelompok sosial dalam medan konflik horisontal. Belum stabilnya kontrol dan kendali kepemimpinan dalam pemerintahan transisional, dimanfaatkan untuk memperlemah konsolidasi kekuatan masyarakat sipil dalam mendorong kepemimpinan dalam menjalankan agenda reformasi. Begitu juga dengan belum stabilnya perekonomian masyarakat menghadirkan jebakan pragmatis lainnya sehingga rentan dipolitisasi kedalam proses politik berdasarkan skenario oligarch yang memiliki kekayaan materi melebihi para aktor kekuatan reformis lainnya. Bahkan dalam proses politik yang mendorong kestabilan demokrasi elektoral, para oligarch juga memainkan peran dan pengaruh yang sangat kuat dalam permainan kekuasaan.

Menurut Winters (2011) kuncinya terletak pada basis oligarki itu sendiri, yakni adanya kepemilikan kekayaan oleh segelintir orang atau kelompok yang akhirnya memberi jalan yang begitu mudah dalam mengendalikan dan mengontrol politik pemerintahan. Lebih lanjut Winters menjelaskan, bahwasannya selama Orde Baru berkuasa mampu melahirkan tipekal oligarki sultanistik, yakni kendali pemerintahan dan kontrol atas monopoli kekerasan dan pemaksaan berada dalam diri satu orang, yakni Jenderal Soeharto. Ia sosok yang bisa menentukan jatuh bangunnya siapapun para oligarch yang menentang kekuasaannya. Ia meletakkan negara bukannya sebagai negara yang melembaga

dalam batasan mekanisme hukum. Soeharto sebagai oligark dalam jejaring kekuasaannya juga membentuk pula lingkaran oligarch, mulai dari pengusaha keturunan China, militer, ekonomi, birokrat, politisi sampai pada anak-anak biologisnya yang semasa Orde Baru berkuasa melakukan akumulasi kekayaan secara ekstrim.

Pasca Orde Baru runtuh para oligarch yang dibesarkan oleh Orde Baru ini berupaya mempertahankan kekayaan dan tetap memperluas kekuasaannya dalam era demokrasi elektoral. Kekayaan yang berlimpah sebagai hasil dari pencapaian kekuasaan selama Orde Baru membuat para oligarch ini fleksibel dalam mengatur dan mengendalikan politik pemerintahan dalam demokrasi elektoral. Dinamika demokrasi elektoral sampai sejauh ini memperlihatkan belum adanya kekuatan yang mendorong proses politik yang membatasi penguasaan kepemilikan kekayaan para oligarch produk Orde Baru. Demokrasi elektoral hanya memberi akses seluas mungkin partisipasi masyarakat tapi tidak memiliki mekanisme politik untuk membatasi pengaruh politik dari para oligarch yang memiliki basis kekayaan materi yang cukup besar. Proses semacam ini membuat oligarki dan demokrasi saling bersandingan yang mengakibatkan kerugian di kalangan masyarakat.

Untuk menjelaskan munculnya oligarki politik yang memunculkan perlawanan sosial ini digunakan sejumlah dimensi teoritik dalam bingkai pemikiran gerakan sosial baru (*new social movement theory*). Dalam teori gerakan sosial baru adanya konflik sosial atau perlawanan sosial tidak lagi berpusat pada konflik kelas, melainkan dipahami dalam konteks yang baru, yakni upaya untuk mendorong reformasi politik, mendorong demokratisasi, mengurangi dominasi dan hegemoni negara atas masyarakat dan penguatan elemen masyarakat sipil sebagai embrio lahirnya gerakan sosial. Para aktor strategis dalam masyarakat yang terlibat dalam perlawanan sosial atau gerakan sosial tidak lagi harus berpusat pada buruh dan petani, namun berpusat pada berbagai elemen kelas menengah perkotaan dan aktivis kampus.

Berbagai dinamika politik terkait proses konflik sosial dan perlawanan sosial antara oligarch, orang kuat lokal lainnya dengan elemen masyarakat sipil dalam melakukan gerakan sosial dilihat pada aspek dimensi politik penentangan (*contentious politics*), sebagaimana pemikiran Doug McAdam, Sidney Tarrow dan Charles Tilly⁽²⁰⁰¹⁾. Dalam dinamika politik penentangan, aspek yang perlu mendapatkan perhatian adalah adanya dimensi sintesis antara faktor internal (subyektif) dalam gerakan dan faktor eksternal yang di dalamnya meliputi struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*), struktur mobilisasi massa, peranan perantara, pembingkai isu (*framing*) dan langgam penentangan (*repertoire of contention*).

Dalam struktur kesempatan politik, beberapa variabel yang dilihat adalah adanya pertentangan politik antaraktor orang kuat lokal dan arena politik yang membuka ruang terhadap munculnya beragam opini kritis yang memberi jalan pada lahirnya aksi kolektif. Untuk struktur mobilisasi, variabel yang dilihat adalah lapisan sosial di dalam masyarakat yang menjadi kekuatan sumber daya

dalam proses mobilisasi massa dan juga adanya pembingkaihan (*framing*) isu yang membuat efek daya tarik dan kesadaran kritis yang membuat aktor atau kelompok sosial di dalam masyarakat termobilisasi. Dalam pembingkaihan (*framing*) agar pesan yang terkait dengan konflik kepentingan tampak kuat dan mengalami dramatisasi sehingga memunculkan efek psikologis yang kuat di dalamnya memerlukan adanya proses seperti (a) penyamaan bingkai (*frame alignment*) (b) penjemabatanan bingkai (*frame bridging*) (c) penguatan bingkai (*frame amplification*) (d) perluasan bingkai (*frame extension*) dan (e) transformasi bingkai (*frame transformation*). Terakhir adalah langgam penentangan (*repertoire of contention*), yakni adanya penggunaan simbol-simbol ritual keagamaan dan pertunjukan seni teatral budaya lainnya dalam aksi-aksi kolektif yang dilakukan.

Sebagaimana diurai sebelumnya, bahwasannya kekuasaan yang dominatif dan dikelola dengan cara oligarkis selalu akan melahirkan kekecewaan politik (*political grievance*), baik di kalangan aktor yang berada dalam lingkaran kekuasaan sendiri maupun mereka yang sejak semula berjarak dengan akses kekuasaan. Namun demikian, kekecewaan politik bukanlah faktor utama yang melahirkan aksi kolektif atau gerakan sosial. Aksi kolektif muncul selain karena faktor subyektif, yakni berupa kekecewaan politik, perbedaan keyakinan atau cara pandang dalam melihat suatu permasalahan dan terhambatnya karir politik seseorang juga sangat dipengaruhi pula oleh adanya faktor eksternal, yakni berupa adanya struktur kesempatan politik dan atau juga struktur ancaman politik tergantung dari konteks lingkungan yang sedang mengalami pergulatan kekuasaan.

Sintesa di antara faktor internal dan eksternal ini menjadi aksi kolektif jika terdapat tantangan bersama yang didasarkan pada adanya tujuan bersama dan solidaritas sosial antar individu atau kelompok sosial yang menginginkan perubahan atau transformasi sosial dalam berinteraksi dengan para elite kekuasaan melalui proses politik penentangan (*contentious politics*). Dalam konteks ini, politik penentangan dilakukan sebagai bagian dari strategi mereka yang tidak berkuasa untuk menentang orang kuat lokal yang berkuasa atau pemegang otoritas pemerintahan. Mereka ini kemudian melakukan tuntutan baru melalui nalar politik rasional dan strategi perlawanan sosial dalam berseteru dengan kekuasaan.

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskripsi kritis. Metode penelitian ini menenpuh beberapa tahapan (1) observasi langsung pada obyek kajian dengan mengamati dan wawancara mendalam atas nara sumber (informan) yang memiliki informasi dan data lainnya yang relevan dengan tema penelitian. (2) kajian literatur berupa buku, hasil penelitian, dokumen, artikel, berita media dan karya sejenis lainnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. (3) melakukan analisis data, mengkontekstualisasikan antara data dengan dimensi teoritik kajian studi untuk mempertajam hasil temuan dan melakukan interpretasi untuk mengkontruksi temuan baru (*novelty*) studi dibandingkan dengan studi sebelumnya.

Budaya Keagamaan dan Lahirnya Oligarki Politik

Studi ini mengurai betapa budaya keagamaan dominan memberikan kontribusi bagi kemunculan oligarki politik lokal. Hal semacam ini dapat ditelusuri dari dimensi pendidikan dan pengajaran keagamaan yang dilakukan oleh kiai kepada putra putri masyarakat telah menciptakan sistem keyakinan (*world view*) yang meletakkan posisi kiai sebagai pusat rujukan spritual masyarakat. Dalam konteks ini, kiai sebagai bagian dari representasi, meminjam istilah Peter L Berger, langit suci (*sacred canopy*) yang memediasi berbagai unsur kepentingan dunia profan (*world of profane*) yang melahirkan dimensi keselamatan yang selalu menjadi orientasi dalam kehidupan keseharian warga masyarakat. Hal ini sebagaimana terlihat dari adanya praktek keberagamaan mengharap *berkah* dan *karomah* di kalangan warga kepada para kiai yang dianggap memiliki kualitas keilmuan dan kealiman yang tinggi, baik semasa masih hidup maupun sesudah meninggal sekalipun.

Kemampuan dalam memahami dan menafsirkan ilmu keagamaan membuat kiai memiliki otoritas keagamaan yang bersentuhan langsung dengan dinamika kehidupan keseharian masyarakat. Otoritas keagamaan ini menciptakan stratifikasi sosial tersendiri yang menciptakan kiai memiliki posisi sosial sebagai bagian dari elite di dalam masyarakat. Otoritas keagamaan kiai di dalam masyarakat dengan sendirinya menciptakan hegemoni pemikiran, membentuk kharisma dan pengaruh yang menimbulkan efek kuasa lainnya terhadap masyarakat. Meski demikian, tidak semua kiai memiliki hegemoni pemikiran dan kharisma yang sama antar satu dengan yang lainnya. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki tingkat apresiasi yang beragam dalam memberikan tingkat penghormatan dan kepatuhan kepada sosok kiai. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya pada bagian ini, bahwasannya posisi sosial keagamaan Syaikhona Kholil dan *trah*nya di Madura memiliki tempat yang paling tinggi dari sisi stratifikasi sosial dan penghormatan masyarakat dibandingkan dengan *trah* kiai non Bani Kholil lainnya²²⁶.

Budaya keagamaan dominan yang dikembangkan atas ketokohan Syaikhona Kholil dan proses reproduksi kharismanya di tengah masyarakat, oleh para pengikutnya menciptakan transformasi kharisma pula kepada *trah*-keturunannya. Transformasi kharisma ini bersentuhan pula dengan bidang-bidang kehidupan masyarakat lainnya, terutama yang terkait dengan politik kekuasaan dalam hubungannya dengan agama (*religio-political power*). singkatnya, pengaruh sosial keagamaan ini bersentuhan dengan relasi-relasi dalam kekuasaan. Konteks inilah yang benar-benar dijadikan sebagai modal utama oleh FAI dalam melihat peluang transisi politik untuk merebut kekuasaan.

²²⁶ Kharisma Syaikhona Kholil tidak hanya di lingkungan keagamaan saja, tapi juga berpengaruh pula pada lingkungan sosial blater. Para blater (jagoan) masih menghormati kharisma budaya keagamaan Syaikhona Kholil. Wawancara dengan MS tanggal 1 Desember 2012.

Memang proses transisi politik saat itu, dalam konteks politik di daerah ditandai masih bercokolnya Gubernur dan juga Bupati sebagai kepala daerah produk pemerintahan Orde Baru yang masih menjalankan praktek pemerintahan. Meski demikian, proses transisi politik ini telah menciptakan struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*) sebagaimana diungkapkan oleh Sydney Tarrow (1994), bahwasannya dalam teori struktur kesempatan politik memiliki empat dimensi perubahan yang mencolok, yakni adanya keterbukaan akses warga untuk berpartisipasi, pergeseran dalam persekutuan kekuasaan, tersedianya sekutu yang berpengaruh dan adanya perpecahan di kalangan elite dalam memandang berbagai isu yang muncul di tengah masyarakat.

Adanya struktur kesempatan politik ini dimanfaatkan sedemikian rupa oleh *trah* Bani Kholil, yakni FAI untuk melakukan perebutan kekuasaan di tingkat lokal. Momentum politiknya saat itu tumbangnya rezim Orde Baru, dan menjelang berakhirnya masa jabatan Moch Fatah sebagai Bupati periode 1998—2003 yang berlatar belakang militer. FAI yang waktu itu terpilih sebagai anggota DPR RI periode 1999--2003 dari PKB, sudah mulai mengincar dan mengkondisikan berbagai elemen politik di BKL untuk menggantikan Moch Fatah. FAI terus berupaya mempengaruhi anggota DPRD dari Fraksi PKB yang memiliki kursi mayoritas di DPRD BKL untuk melakukan penolakan LPJ tahunan Bupati. FAI akhirnya terpilih menjadi Bupati melalui mekanisme pemilihan di tingkat DPRD sampai berlanjut pada periode masa jabatan kedua sebagai bupati melalui proses pemilihan secara langsung rakyat.

Terpilihnya FAI sebagai Bupati BKL menjadi babakan baru politik di Madura dan secara khusus di BKL. FAI yang berasal dari budaya lingkungan keagamaan dominan, *Nahdlatul Ulama'* (NU), *trah* Syaikhona Kholil yang selama ini lebih banyak mengambil jalur politik kultural yang berada di pinggiran kekuasaan kini menjadi sentral politik baru pemerintahan di tingkat lokal. Pemisahan orientasi budaya keagamaan dominan dengan birokrasi yang selama ini sudah berlangsung sejak zaman VOC-Belanda menjadi menyatu kembali dalam politik kekuasaan era reformasi dengan terpilihnya FAI sebagai Bupati BKL.

Sebagaimana diungkapkan oleh Max Weber yang membagi sumber kekuasaan kedalam tiga tipe sumber legitimasi, yakni tradisi, kharisma dan instrumen rasional seperti kekuasaan yang diperoleh berdasarkan aturan legal rasional²²⁷. Dengan terpilihnya FAI, ketiga sumber legitimasi kekuasaan ini menyatu dalam konstruksi diri FAI. Sebagai keturunan Syaikhona Kholil, FAI mereproduksi identitas kultural sebagai bagian dari tokoh agama, sebagaimana sebutan kiai dan haji yang selalu disandangnya. Ia juga memiliki kharisma selain dari lingkungan keagamaan juga dari non keagamaan, yakni keblateran karena selama remaja dan dewasanya, ia juga dibesarkan dalam budaya keblateran. Kemudian sebagai bupati terpilih, ia memiliki legalitas rasional untuk

²²⁷ Kieran Allen, *Max Weber: A Critical Introduction* (London : Pluto Press, 2004), hlm. 100.

menggunakan dan mengendalikan berbagai instrumen pemerintahan dalam memperkokoh legitimasi kekuasaannya.

Keberhasilan FAI sebagai Bupati BKL tidak bisa dilepaskan dari adanya struktur kesempatan politik yang mampu dimanfaatkan sedemikian rupa. FAI memiliki kemampuan mentransformasikan *symbolic goods* sebagai keturunan Syaikhona Kholil yang selama ini terus menerus mengalami proses reproduksi makna secara kultural sebagai simbol kebaikan, rujukan spritual keagamaan kepada proses politik, dalam bentuk dukungan politik kekuasaan (*symbolic power*) di dalam arena politik kuasa. (Karabel & Hasley, 2004). Dalam menstrasformasikan *symbolic goods* ke *symbolic power* ini, FAI bermula dengan menggunakan modal budaya, memframing pengaruh Syaikhona Kholil di dalam masyarakat yang ditransformasikan sebagai alat politik untuk merebut kekuasaan.

Modal budaya ini pada akhirnya memudahkan dirinya pula untuk memperoleh modal ekonomi, berupa dukungan dari pengusaha Madura yang bersimpati pada dirinya dalam pendistribusian sumber daya material yang digunakan dalam proses mobilisasi massa dan juga lobi politik untuk menyelesaikan gugatan penggunaan ijazah palsu oleh lawan politiknya saat pencaolan menjadi bupati. Modal budaya ini juga memberi jalan yang terbuka lebar terhadap modal sosial lainnya, yakni kemudahan ketika merangkul berbagai jaringan para aktor dan kelompok sosial di dalam masyarakat dan jaringan pemerintahan lainnya, seperti Mabes Polri, Kementrian dan petinggi parpol untuk mendukung proses pelantikannya sebagai Bupati terpilih. Menjelang periode akhir masa jabatan sebagai Bupati dan berakhirnya pengusutan penggunaan ijazah palsu melalui SP3 oleh kepolisian, FAI benar-benar melakukan konsolidasi kekuasaan secara oligarkis.

Oligarki politik ini dibangun dengan beberapa cara diantaranya, yakni: *Pertama*, membangun representasi tunggal sebagai sosok yang paling otoritatif dalam menggunakan ikon sebagai *trah* Bani Kholil dibandingkan dengan sesama anggota *trah* lainnya. FAI melakukan dua pendekatan untuk menghadirkan ikon ini ke dalam pembentukan identitas dirinya, yakni dengan mereproduksi silsilah (*geneology*) yang merujuk garis tunggal sebagai keturunan laki-laki satu-satunya dari kalangan *trah* Bani Kholil. Sebagaimana umumnya dalam masyarakat yang masih memelihara kultur patriarkhi, bahwasannya kekuasaan keluarga selalu diwariskan atau berada di tangan garis keturunan anak laki-laki. Selain itu, ia juga mengkonsolidasi dan menduduki jabatan sebagai Ketua Yayasan Bani Kholil. Dengan pendekatan itu, ia berhasil menjadi sentral dan menjadikan anggota *trah* lainnya berada di pinggiran pengaruh darinya.

Kedua, mengedalikan para klebun atau kepala desa agar selalu menjadi tergantung kepada FAI. Banyak para klebun dikondisikan dengan status sebagai Pejabat Sementara (PJS). Status PJS itu sendiri merupakan permainan politik FAI. Posisi sebagai PJS klebun membuka peluang terhadap persaingan antar aktor dan kelompok di dalam masyarakat untuk berburu menduduki jabatan klebun. Dari sebanyak 281 desa di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten BKL

berdasarkan data BPS Tahun 2001, terdapat sebanyak 133 kebun yang menjabat dengan status sebagai PJS. Kondisi semacam ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa ada kejelasan dan kepastian adanya mekanisme resmi kapan akan diadakannya penyelenggaraan pemilihan kebun. Bahkan ada kebun dengan status PJS selama 20 tahun.

Ketiga, mengendalikan parpol melalui pengaruh uang. Diantara faktor dari lemahnya partai politik sebagai alat ideologi adalah kuatnya jeratan oligarki elite dan uang sehingga dalam proses melakukan kaderisasi, rekrutmen politik dalam pemilu selalu tidak didasarkan dalam proses politik yang memperhatikan kapabilitas, komitmen, *track record* dan loyalitas kader. Bahkan tak jarang setiap menjelang Pilpres dan Pemilukada, proses dukung mendukung pancalonan presiden dan juga kepala daerah dijadikan sebagai ajang untuk meraup keuntungan materi sebagai kompensasi dalam memberi dukungan politik. Praktek membeli dukungan partai seringkali dilakukan oleh FAI dalam memelihara kekuasaannya selama dua periode masa jabatan dan berlanjut pada putranya sebagai bupati, dengan cara melakukan kartelisasi politik, yakni menyingkirkan para pesaingnya sebelum bertanding dan memilih calon “jadi-jadian” sebagai pendamping calon yang sesungguhnya (Daniel & Peter Mair, 1975).⁽

Keempat, mengendalikan berbagai instrumen penyelenggaraan pemilu. Mulai dari KPPS, PPK dan KPUD. Proses rekrutmen anggota KPUD tidak lepas dari pengaruhnya. Para tim seleksi dan proses penjarangan dari para pendaftar menjadi 10 besar sebelum diajukan ke KPU Provinsi yang akhirnya nantinya memilih 5 orang komisioner terpilih merupakan orang-orang yang sebelumnya sudah mengalami proses seleksi berdasarkan kedekatan dengan akses FAI. Untuk keanggotaan PPK berada dalam kendali Camat dan semua Camat berada dalam kendali FAI. Para Camat tidak ada yang berani menjalankan agenda politik sendiri, sebab bila itu dilakukan maka posisi jabatannya sebagai Camat akan mudah digeser oleh orang lain, atau sang Camat akan dipindah ke wilayah pedalaman sebagai hukuman.

Oligarki Politik dan Perlawanan Sosial

Kekuasaan yang dominatif dan dikelola dengan cara oligarkis tentu akan melahirkan kekecewaan politik (*political grievance*), baik itu di kalangan aktor yang berada dalam lingkaran kekuasaan sendiri dan terlebih lagi mereka yang sejak semula memang mengambil jarak dengan kekuasaan. Meskipun dimensi kekecewaan politik bukanlah faktor utama yang dapat mendorong munculnya aksi kolektif atau gerakan sosial. Aksi kolektif dapat muncul selain karena faktor internal aktor penggerakannya, yakni berupa kekecewaan politik, perbedaan keyakinan atau cara pandang dalam melihat suatu permasalahan dan terhambatnya karir politik seseorang, juga sangat dipengaruhi pula oleh adanya faktor eksternal, yakni berupa adanya struktur kesempatan politik dan atau bisa juga karena adanya struktur ancaman politik. Kondisi dinamiknya sangat

tergantung pada konteks lingkungan dan karakter politik lokal yang sedang mengalami pergulatan kekuasaan.

Intesa di antara faktor internal dan eksternal ini saling mendorong jika terdapat proses pengorganisasian atas tantangan bersama yang didasarkan pada adanya tujuan bersama dan solidaritas sosial antar individu atau kelompok sosial yang menginginkan perubahan atau transformasi sosial dalam berinteraksi dengan para elite kekuasaan melalui proses politik penentangan (*contentious politics*) dalam bentuk aksi kolektif atau perlawanan sosial. Dalam konteks ini, politik penentangan dilakukan sebagai bagian dari strategi mereka yang tidak berkuasa untuk menentang elite yang berkuasa atau pemegang otoritas pemerintahan. Mereka ini kemudian melakukan tuntutan baru melalui nalar politik rasional dan strategi gerakan sosial dalam berseteru dengan kekuasaan yang mengendalikan pemerintahan.

Berbagai praktek *rent seeking* dalam pengerjaan proyek APBD dan proyek sejenis lainnya menghasilkan praktek pembangunan yang tidak berkualitas, tidak menyentuh perbaikan kesejahteraan masyarakat. Praktek *state predatory* yang dilakukan oleh oligarch lokal ini juga sangat mengganggu percepatan pembangunan, sebagaimana yang terjadi pada kasus pengembangan wilayah Suramadu. Impian lahirnya perubahan dari rezim baru yang sangat dekat dengan budaya keagamaan masyarakat dibandingkan dengan kepemimpinan yang berasal dari basis sosial militeristik di zaman Orde Baru, tentu menimbulkan kekecewaan masyarakat, terutama pada pendukungnya yang masih memiliki keinginan perubahan.

Jika dilihat dari para aktor utama penggerak perlawanan sosial melalui aksi kolektif di BKL dapat diidentifikasi dalam tiga kategori; **Pertama**, mereka yang sebelumnya berada dalam lingkaran kekuasaan lalu memutuskan untuk mengambil jarak dan terlibat dalam akses penentangan politik (*contentious politics*). Kelompok ini dimotori oleh MT dengan lembaganya CIDE (*Center for Islam and Democracy Studies*) dan AL dengan lembaganya LEKSDAM (Lembaga Sosial Demokrasi dan Hak Asasi Manusia). Kedua aktivis ini di masa lalu pernah bermitra dengan FAI namun dalam perkembangannya mengambil sikap beroposisi. Sikap oposisi ini diambil, sebagaimana dalam penuturan MT karena FAI tidak konsisten dalam memperjuangkan perbaikan masyarakat dan lebih cenderung menerapkan proses membangun kepemimpinan dengan cara oligarkis dan mempergunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri. “*Tak banyak yang diharapkan dari seorang penguasa yang lebih memetingkan kekayaan dibandingkan rakyatnya dengan kekuasaan yang begitu dominan karena memperoleh dukungan sosial dari lingkungan keagamaan dan keblateran*,” ungkap MT²²⁸. MT semakin gigih melakukan perlawanan saat rumahnya diteror dengan cara dilempar batu dan mobilnya dibakar oleh orang yang diperkirakan suruhan oligarch lokal. MT berpisah sebagai mitra sejak masa jabatan pertama

²²⁸ Wawancara dengan MT, tanggal 3 Desember 2012.

kepemimpinan FAI sebagai bupati, sedangkan AL, temannya MT, berpisah sebagai mitra FAI pada periode kedua kepemimpinan sebagai bupati.

Kedua, mereka yang sejak dari awal mengambil jarak dan bersikap kritis terhadap kekuasaan. Kelompok ini motor utamanya adalah AS melalui organisasinya, yakni BKL *Corruption Wacth* (BCW) yang kemudian memperluas advokasinya dan bermetamorfosis menjadi Madura *Corruption Wacth* (MCW). Selain sosok AS, juga yang sangat lantang suara kritisnya adalah saudara FR dengan lembaganya yang bernama LIRA (Lumbung Informasi Rakyat). Baik AS dan FR secara kontinyu terus menyoroti isu-isu korupsi dan kecenderungan adanya praktek penyalahgunaan kekuasaan lainnya dalam kebijakan publik yang tidak transparan dan akuntabel. Para aktivis BCW/MCW dan LIRA selalu mengedepankan data yang akurat dalam menyampaikan kritik dan pendapatnya, khususnya yang terkait dengan dugaan penyalahgunaan anggaran daerah dan ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dengan kualitas pelayanan. Para aktivis gerakan mahasiswa juga banyak yang bergabung dengan BCW, baik itu mahasiswa Madura yang kuliah di Surabaya dan juga yang kuliah di perguruan tinggi yang ada di Madura sendiri. Dalam melakukan aksinya, mereka juga menggunakan nama lain, seperti dengan cara membuat komite aksi sebagai organ taktis, yang keberadaannya disesuaikan dengan isu dan momentum politik dalam mengkritisi kebijakan public yang sedang menjadi sorotan hangat masyarakat.

Salah seorang aktivis BCW-AS, mengutarakan motivasinya melakukan perlawanan terhadap oligarki politik FAI karena potret kemiskinan dan kebodohan masih menyelimuti warga di BKL. Banyak warga yang hidup dalam kemiskinan karena tidak memiliki akses terhadap berbagai proyek pembangunan. Komitmen kepemimpinan Bupati juga sangat rendah dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat, meski APBD BKL terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, khususnya DAU dari pemerintah pusat, tak banyak menyentuh warga karena dikorupsi.²²⁹

Ketiga, mereka yang masih memiliki ikatan kekerabatan (*genealogy*) sebagai anggota keluarga besar *trah* Syikhona Kholil yang saling membangun perseteruan atau penentangan politik antar satu sama lain. Penggerak utamanya adalah IBK dan NA, kesehariannya selain mengasuh pondok pesantren juga sering memberikan ceramah pengajian keagamaan di masyarakat. Keduanya pernah menjadi pengurus PKNU. Baik IBK dan NA, masih merupakan keponakan dari FAI sebagai sesama *trah* Bani Kholil. Motif utama keduanya melakukan penentangan politik karena menganggap FAI selama ini tidak menghormati konsensus bersama dalam musyawarah keluarga besar yang memutuskan adanya rotasi kekuasaan secara bergilir sesudah FAI menjabat sebagai kepala daerah kepada sang keponakan, yakni IBK. FAI tidak menaati keputusan konsensus keluarga, dan melanjutkan ambisi politiknya untuk terus

²²⁹ Wawancara dengan AS, tanggal 4 Desember 2012.

melenggang mulus dua periode sebagai bupati dan meneruskan kekuasaannya sebagai bupati kepada sang anak melalui PemiluKada, 12 Desember 2012.

Faktor lainnya yang membuat IBK dan NA termotivasi untuk melakukan perlawanan sosial terhadap oligarki politik FAI adalah adanya politisasi nilai-nilai keagamaan, khususnya figur keagamaan yang memancar dalam kharisma Syaikhona Kholil untuk tujuan kekuasaan semata. Bahkan FAI yang juga menggunakan identitas kekiaian, demi ambisi kekuasaan dinilai mulai melunturkan tradisi keagamaan yang selama ini sangat dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini sebagaimana terlihat ketika mengadakan temu tokoh blater, dengan menggunakan baju blater ikut menari dan *nyamer* dengan dua orang *tandhe'* perempuan. Dalam tradisi keagamaan Madura, seseorang yang taat dalam memelihara nilai keagamaan, dipandang tabu atau tidak pantas menari dengan *tandhe'*, atau sejenis tayub dalam masyarakat Jawa, perempuan yang bukan muhrimnya, terlebih di depan umum. Perilaku semacam ini bukanlah teladan yang baik untuk seorang tokoh agama dihadapan masyarakat yang masih kuat memegang teguh budaya santri. IBK menilai bahwa kekuasaan FAI semakin melenceng dari budaya keagamaan masyarakat sehingga membuatnya semakin terdorong untuk tidak menyerah melakukan politik penentangan melalui mekanisme politik dalam arena PemiluKada.²³⁰

Ketiga kategori kelompok sosial di atas menepis anggapan sebelumnya yang pernah berkembang bahwasannya oligarki politik FAI tidak mungkin memunculkan keberanian dari para aktor atau komunitas politik di BKL dalam melakukan perlawanan sosial. Para aktivis dari berbagai kelompok sosial melakukan aksi kolektif dengan memanfaatkan struktur kesempatan politik dan saling memberi dukungan satu sama lain untuk memperluas opini dan pengaruhnya terhadap masyarakat akan pentingnya perubahan, perbaikan kondisi yang tidak bisa lagi diharapkan selama kekuasaan pemerintahan dikendalikan oleh FAI. Para aktivis yang tergabung dalam CIDE, BCW, LEKSDAM dan LIRA melakukan tekanan politik melalui rangkaian berbagai aksi demonstrasi, seminar dan pernyataan pers di ruang publik dan memposting informasi dan opini kritis lainnya di sosial media, seperti *facebook* dan *twitter* guna memperluas pengaruh politiknya di tengah masyarakat dan sekaligus berupaya mendelegitimasi kekuasaan FAI secara berlahan-lahan. Tekanan politik sebagaimana dalam bentuk aksi demonstrasi yang kerap kali mereka lakukan menukik pada dua sasaran, yakni terkadang secara langsung pada FAI, sebagai pucuk kepala daerah dan sasaran berikutnya, yakni secara tidak langsung ditujukan kepada praktek kinerja lingkungan SKPD, institusi penegak hukum, seperti Kejaksaan dan Kepolisian yang diharapkan memiliki efek berupa tekanan politik terhadap kekuasaan FAI.

Sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil, para aktivis ini bekerja melancarkan perlawanan sosial dari luar sistem, namun tetap pula membangun aliansi strategis dengan para politisi yang berada di dalam sistem, seperti

²³⁰ Wawancara dengan IBK, tanggal 1 Desember 2012.

anggota DPRD BKL dari Fraksi PKNU. IBK sebagai Ketua Dewan Syuro PC PKNU BKL, dengan 5 suara Fraksi-PKNU di DPRD BKL selalu bersikap kritis dan mengambil peran sebagai partai oposan dengan mengkritisi berbagai aspek kebijakan pemerintah daerah.

Perlawanan sosial terhadap oligarki politik lokal ini terlihat dari adanya keberanian para aktivis di BKL saat membongkar adanya dugaan kuat praktek korupsi yang diduga kuat melibatkan FAI dalam program bantuan dana pengungsi korban kerusuhan etnis di Sambas dan Sampit Kalimantan. Dalam analisa BCW, indikasi ketidakberesan ini terlihat dari adanya perbedaan data pengungsi yang sudah menerima bantuan, yang sudah diakhiri status pengungsinya, antara Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten BKL yang mendata jumlah pengungsi tahun 2003 sebanyak 8.497 KK, 34.724 jiwa dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang mendata sejumlah 8.445 KK 34.720 jiwa.

Berbagai pendekatan sudah dilakukan oleh BCW terkait adanya dugaan penyalahgunaan dana pengungsi ini, yakni melalui serangkaian aksi demonstrasi sejak periode awal kepemimpinan FAI sebagai Bupati BKL. BCW juga membawa kasus dugaan korupsi ini kepada aparat penegak hukum di BKL dan melaporkannya pula kepada Polda Jatim. Namun, para penegak hukum di BKL dan Jatim lebih memilih bungkam dan bahkan dalam perkembangannya, Polda Jatim mengeluarkan SP3 atas kasus ini. Menjelang berakhirnya periode kedua kepemimpinan FAI sebagai Bupati BKL, BCW yang tidak pernah kenal menyerah kemudian memilih langkah untuk melakukan aksi demonstrasi di depan gedung KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Jakarta dan melaporkannya agar KPK dapat segera mengusut kembali kasus ini dan segera dapat menangkap para pelakunya. Proses aksi demonstrasi yang sebelum ini dilakukan di BKL dan Jatim, kemudian diperluas dengan memanfaatkan struktur kesempatan politik di tingkat nasional, yakni dengan mendatangi KPK sebagai lembaga yang selama ini paling berani dan dipercaya masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi. Dalam melakukan aksinya di gedung KPK pada tanggal 7 Oktober 2012, para aktivis BCW melakukan pembingkai (*framing*) isu utama sebagai sosok yang harus menjadi perhatian utama KPK, yakni FAI sebagai oligarch lokal, sebagai dalang utama.

Perlawanan sosial yang paling hebat adalah saat pendiskualifikasian pencalonan IBK dalam pencalonannya sebagai Bupati pada Pemilu 2012. IBK yang masih kerabat FAI melakukan perlawanan dan aliansi politik dengan organisasi masyarakat sipil lainnya. Berbagai aksi demonstrasi menjadikan jalanan di kota BKL seperti lautan manusia sehingga meminta bantuan Kapolri yang menurunkan Brimob Kelapa Dua dari Jakarta untuk memadamkan aksi massa yang berpotensi menggagalkan pelaksanaan Pilkada 2012.

Pasca pendiskualifikasian IBK dalam kontestasi politik, muncul kembali teror dan kekerasan politik yang dialami pendukungnya, yakni Muzakki dan Mahmudi mengalami pembacokan dalam proses politik penentangan itu.

Peristiwa pembacokan aktivis menambah deretan panjang dari peristiwa sebelumnya, sebagaimana yang dialami oleh Noor Hidayat, Fahrillah saat mengkritisi kebijakan bupati, dan penembakan terhadap saudara Mathur Kusairi, aktivis anti korupsi BKL.

Teror dan kekerasan politik yang menimpa para aktivis ini tentu saja menjadi ancaman bagi demokrasi lokal. Suasana teror dan kekerasan potensial memperlemah partisipasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jejak teror dapat pula menimbulkan efek traumatik para pelakunya dan lingkungan orang dekatnya. Efek teror juga memberi pesan pada generasi berikutnya agar menjadi alergi untuk terlibat membangun sikap kritis dan melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Tidak adanya kontrol terhadap kekuasaan akan dapat menciptakan pemerintahan yang otoriter dan diskriminasi politik karena warga yang tidak berada dalam lingkaran kekuasaan akan mengalami eksklusi politik pembangunan, akibatnya jalan meraih kesejahteraan menjadi tersandera oleh politik oligarki yang represif dan makin mengarah pada praktek otoritarian karena adanya penggunaan instrumen kekerasan untuk membungkam sikap kritis warga.

Teror dan kekerasan politik semacam di atas dapat mengkondisikan dinamika kekuasaan di BKL pada lorong gelap *Philipinanisasi* politik, yakni gejala politik kekerasan, pembunuhan dan pembataian lawan politik yang mengganggu kepentingan kekuasaannya. Sebagaimana yang terjadi pada kasus Pemilukada antar klan politik di Philipina pada 23 November 2009, yang melibatkan Ismail Toto, klan Mangundadatu dengan sekelompok paramiliter suruhan Andal Ampatuan Jr, putra dari Andal Ampatuan Sr. (Mercado, 2010). Aparat penegak hukum sangat lemah berhadapan dengan kekerasan politik antar Klan ini sehingga kekerasan politik terus berkembang menjadi virus yang merusak demokrasi politik di Philipina.

Kesimpulan

Di tengah budaya *civil society* yang belum kuat, orang kuat lokal dapat melakukan politisasi atas basis sosial keagamaan yang berkembang kearah oligarki politik. Nilai keagamaan yang semestinya digunakan sebagai orientasi kekuasaan untuk memperbaiki rakyat, justru digunakan untuk memperkaya diri dan memperkuat politik dinasti.

Hal ini kemudian memunculkan perlawanan politik, baik dari lingkungan kerabat dan aktivis sosial dari kalangan masyarakat sipil lainnya. Oligarki politik FAI melucuti peran dan fungsi negara lebih sibuk mengurus kepentingan dirinya semata. Berbagai instrumentasi politik pemerintahan dipergunakan untuk menopang kekuasaan dalam rangka mengakumulasi kekayaan. FAI memainkan peran sebagai *state predatory*, praktek *rent seeking*, politik teror dan kekerasan terhadap aktivis sosial untuk membungkam adanya kritik dan perlawanan sosial agar dapat mempertahankan kekuasaannya.

Dapat disimpulkan kepemimpinan yang dikembangkan FAI adalah **tipe oligarki kleptokratik represif**. Tipe oligarki politik sejenis ini melakukan

perpaduan atau kombinasi dari berbagai teori tentang orang kuat lokal yang dikembangkan oleh para ilmuwan sebelumnya. Sebagaimana dalam teori Migdal, orang kuat lokal berasal dari basis sosial elit tradisional, basis sosial keagamaan dominan, FAI masuk dalam kategori ini, meski ia mampu beradaptasi dengan situasi politik modern. FAI mengembangkan pola dukungan politik yang memadukan antara unsur keyakinan keberagamaan masyarakat atas kepatuhan pada kharisma Syaikhona Kholil di tingkatan masyarakat bawah. Politik uang digunakan pada tingkatan elit massa dalam memelihara dukungan politik. Dalam konteks ini, dukungan politik warga tidak selalu didasarkan pada aspek yang melulu bersifat materialisme, sebagaimana dalam pandangan Vedi R Hadiv ataupun juga Jeffry Winters. Namun, cara FAI membangun oligarki politik sangat dekat pula dengan pemikiran Hadiz dan Winters, yakni pada orientasi ekonomi politik untuk mengakumulasi kekayaan. Masyarakat lemah dihadapan negara dalam kendali FAI, tapi negara lemah dihadapan FAI sehingga dalam posisi seperti ini, benar pula apa yang dikatakan oleh John T Sidel, bahwa kesuksesan berbagai investasi dan industrialisasi suatu daerah di dalamnya, sangat tergantung seberapa besar mengakomodasi kepentingan orang kuat lokal. ###

Bibliography

Buku

- Bourdieu, Pierre, "The Forms of Capital", dalam J.G. Richardson (ed), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, New York: Greenwood Press, 1986.
- , Cultural Reproduction and Social Reproduction, In: Karabel, J., & Hasley, A.H.(eds.), *Power and Ideology in Education*, New York: Oxford University Press, 1977.
- Blok, Anton, *The Mafia of a Sicilian Village 1860-1960: A Study of Violent Peasant Entrepreneurs*, London: Basil Blackwell, 1974.
- Femia, Joseph V., *Gramsci's Political Thought: Hegemony, Consciousness, and the Revolutionary Process*, Oxford: Clarendon Press, 1987.
- Fung, Archon dan Erik Olin Wright, *Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*, London, New York: Verso, 2003..
- Hadiz, Verdi R, *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*, Jakarta: LP3ES, 2005.
- , *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*, California: Stanford University Press, 2010.
- Harris-White, Barbara, *India Working: Essay on Society and Economy*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, Series Contemporary South Asia 8.
- Hallet, Tim, *Symbolic Power and Organizational Culture*, Sociological Theory, Vol.21, No.2, 128-149.

- Klinken, Gerry van, *Patronage Democracy in Provincial Indonesia*, In *Rethinking Popular Representation*, edited by Tornquist, O, Webster, W., and Stokke, K, New York: Palgrave, 2009.
- Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.
- McAdam, Doug, Sidney Tarrow and Charles Tilly, *Dynamics of Contention* Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Migdal, Joel S, *Strong Societies and Weak State: State Society Relations and State Capabilities in The Third World*, Jew Jersey: Princeton University Press, 1988.
- Maribeth dan Priyambudi Sulistiyanto (eds.), *Deepening Democracy in Indonesia: Direct Election for Local Leaders-Pemilukada*, Singapore: ISEAS, 2009.
- Mas'ud, Abdurrahman, *Dari Haramaian Ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Rozaki, Abdur, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa: Kiprah Kiai dan Blater sebagai Rezim Kembar di Madura*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2003.
- _____, (eds.), *Kelompok Kekerasan dan Bos Lokal di Era Reformasi* (Yogyakarta, IRE Press dan CSEAS Universitas Kyoto, 2006.
- Robison, Richard dan Vedi R Hadiz, "Oligarchy and Capitalism: The Case of Indonesia", dalam Luigi Tomba (ed.), *East Asian Capitalism: Conflicts, Growth and Crisis*, Milan: Fondazione Giancomo Feltrinelli, 2002.
- _____, dan Vedi R Hadiz, *Reorganizing Power in Indonesia: The Politic of Oligarchy in an Age of Markets*, London: Routledge Curzon, 2004.
- Sidel, John T, *Capital, Coersion, and Crime: Bossism in the Philipines*, California: Stanford University Press, 1990.
- _____, *Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailand dan Indonesia*, dalam John Harris, Olle Tornquist, Kristian Stokke (eds.), *Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru*, Jakarta: Demos, 2005.
- Stainback, Susan, *Understanding and Condusing Qualitative Research*, Dubuque Iowa: Kendal/Hunt Publishing Company, 1988.
- Smith, Philip, *Cultural Theory: An Intruduction*, Oxford & Massachusetts: Blackwell Publishers, 2001.
- Tarrow, Sidney, *Power in Movement Social Movement and Contentious Politics*, Cambridge: Cambridge University Press, 1998
- Weber, Max, *The Sociology of Religion*, translated by Epharin Fischhoff, Boston: Beacon Press, 1967.
- Winters, Jeffrey A., *Oligarch*, New York: Cambridge University Press, 2011.

Jurnal dan Encyclopedia

- Frank, Zephyr Lake, *Elite Families and Oligarchic Politics on The Brazilian Frontier: Mato Grosso, 1889-1937*, *Latin American Research Review*, Vol. 36. No. 1, 2001.
- Hart, Stephen, "The Cultural Dimension of Social Movement: A Theoretical Reassessment and Literature Review," *Sociology of Religion*, 1996.

- Kitschelt, Herbert, "Citizens, Politicians and Party Cartelization: Political Representation and State Failure in Post Industrial Democracies", dalam *European Journal of Political Research* 37.
- Rozaki, Abdur, "The Social Origin of Political Power of Blaters (Thugs) in Madura", *Kyoto Review of Shoutheast Asia*, Universitas Kyoto Jepang, Desember 2009.

- Paramastri, Ira. (2010). "Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children." *Jurnal Psikologi*. Vol.37, No.1: 1-12.
- Rodiah, Ita. (2014). *Perempuan dan Narasi dalam Kesusastraan Indonesia Kontemporer*. Ciputat: Cinta Buku Media.
- Rubin, Gayle. (1996). "The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex." dalam Joan W. Scott (ed), *Feminism and History*. New York: Monthly Review Press.
- Ruether, Rosemary Radford. (1989). "The Western Religious Tradition and Violence against Women in the Home." dalam Joanne Carlson Brown and Carole R. Bohn (ed), *Christianity, Patriarchy, and Abuse*. Cleveland, OH: Pilgrim.
- Saadawi, Nawal el. (1960). *Mudhakkirat Tabibah*. Beirut: Dar al-Ma'arif.
- Saputra, Asep Deni. (2011). "Perempuan Subaltern dalam Karya Sastra Indonesia Poskolonial." *Literasi*, Vol. 1, No. 1: 16-30.
- Sudarnoto. (1996). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sukidi, (2008). *Teologi Inklusif Cak Nur*. Jakarta: Kompas.
- Sultana, Abeda. (Juli 2010-Juni 2011). "Patriarchy and Women's Subordination: A Theoretical Analysis," *The Art of Faculty Journal*, 1-18.
- Tong, Rosemary Putnam. (2009). *Feminist Thought*, Edisi Ke-3. USA: Westview Press.
- Tracy, Steven R., (September, 2007). "Pathriarchy and Domestic Violence: Challenging Common Misconception," *JETS*, Vol. 50, No. 3: 573-594.